

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang kekurangan dana (*defisit unit*).¹

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*Trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²

Dengan demikian, dalam prakteknya pembiayaan adalah:

- a. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari.

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 2001, hlm. 160.

² Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 3.

- b. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
- c. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.³

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal diatas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong.
- b. Adanya kepercayaan *shahibul mal* dengan *Mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *Mudharib*.

³ *Ibid*, hlm. 4.

- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *Mudharib* kepada *shahibul mal*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (*credit instrumen*).
- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *Mudharib*.
- e. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul mal* maupun dilihat dari *Mudharib*. Misalnya, pemilik uang memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
- f. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik dipihak *shahibul mal* maupun dipihak *Mudharib*. Risiko dipihak *shahibul mal* adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidak mampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidak sediaan membayar. Risiko dipihak *Mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shohibul mal* yang bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.⁴

⁴ *Ibid*, hlm. 5.

3. Fungsi Pembiayaan

Ada dua fungsi pembiayaan yaitu:

- a. *Profitability*: yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, Bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga untuk keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.
- b. *Safety* keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu benar-benar terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.⁵

⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *op.cit*, hlm. 6.

4. Peranan Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang.

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitasi, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

- b. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/minyak goreng, peningkatan *utility* padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya.⁶

- c. Pembiayaan dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral

⁶ *Ibid*, hlm. 7.

dan sejenisnya cheque, giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan.

d. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat.

e. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitasi sarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

f. Pembiayaan sebagai jembatan peningkatan pendapatan nasional

Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tertentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah.⁷

⁷ *Ibid*, hlm. 8.

- g. Pembiayaan sebagai alat hubung ekonomi internasional

Lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga diluar negeri. Lalu lintas pembayaran internasional pada dasarnya berjalan lancar bila disertai kegiatan pembiayaan yang sifatnya internasional.⁸

B. Pembiayaan *Qardh al-Hasan*

1. Pengertian Pembiayaan *Qardh al-Hasan*

Al-Qard dalam bahasa Arab maknanya *al-qat'u* yang membawa maksud potongan.⁹

Al-Qard dari segi syara' adalah suatu akad perjanjian pinjaman antara pemiutang dengan peminjam.¹⁰

Qardh atau *Iqradh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah (ta'rif) adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama”.¹¹

Qordhul Hasan adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹²

⁸ *Ibid*, hlm. 9.

⁹ Osman Sabran, *Urus Niaga Al-Qard Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Skudai: Universiti Teknologi Malaysia, 2001, hlm.59.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 61.

¹¹ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 137.

¹² *Ibid*, hlm 143.

Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹³

Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁴

Qardhul Hasan adalah kegiatan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁵

Qard merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).¹⁶

Qard adalah memberikan pinjaman dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.¹⁷

Qard adalah akad pinjam-meminjam (uang) antara satu pihak dengan pihak lainnya. Jika ada jaminan, maka ini menjadi *rahn*.¹⁸

Al Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *al qard* adalah pemberian pinjaman

¹³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 70.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *lok.cit*, hlm. 131.

¹⁵ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, Cet. Ke-1, 2000, hlm.150.

¹⁶ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 783.

¹⁷ Sultan Remy Sjahseini, *Perbankan Islam*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, Cet ke-3, 2007, hlm. 75.

¹⁸ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta:AlvaBet, 2000, hlm. 205

tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Dalam hasanah fiqh, transaksi al qard tergolong transaksi kebajikan atau *tabarru* atau *ta'awuni*.¹⁹

Al Qardhul Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.²⁰

Dari beberapa uraian di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa pengertian *Qardh al-Hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggota yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak, dimana penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan BMT hanya membebani anggota atas biaya administrasi.

2. Landasan Syariah Pembiayaan *Qardh al-Hasan*

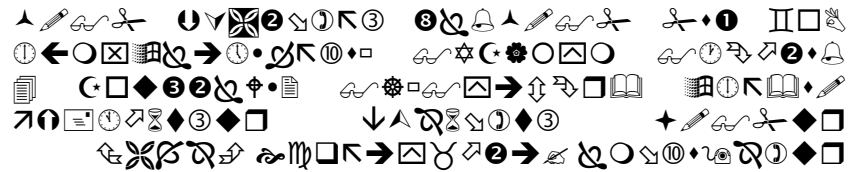
Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majjah dan Ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.²¹

a. Al-Qur'an

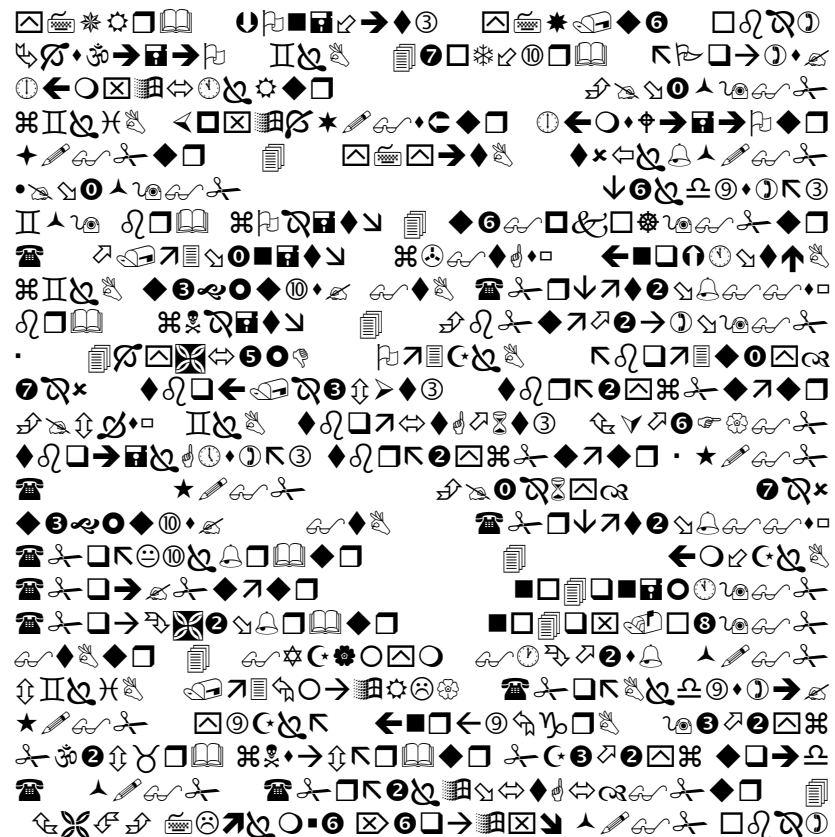
¹⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, cet ke-2, 2005, hlm. 174.

²⁰ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992, hlm. 33.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *lok.cit*, hlm. 129.



“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah,
pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka
Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan
lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan
melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu
dikembalikan.”(Qs. al-Baqarah: 245)²²



²² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Intermasa, 1996, hlm. 60.

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Qs. al-Muzammil: 20)²³



²³ Ibid, hlm. 990.

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (al-hadid ayat 11)²⁴

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah.

Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).²⁵

b. Al-Hadits

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَى الْيَدِمَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

“Dari Samurah bin Jundab r.a Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, “tangan bertanggung jawab atas apa yang diambilnya sampai ia mengembalikannya”.

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan imam empat. Hadist ini dinilai sahih oleh al-Hakam).²⁶

﴿ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي فِي بَيْ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِشَمَانِيَةِ عَشْرِ فَقُلْتُ يَا

²⁴ *Ibid*, hlm. 902.

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, hlm.132

²⁶ Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Surabaya: Nurul Huda, 773 H – 852 H, hlm. 182.

جِبْرِيلُ مَا بَالَ الْقَرْضِ أَفْضَلَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ
وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat pada waktu malam di-isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, ‘Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?’ Ia menjawab, ‘Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminta kecuali karena keperluan.’”(HR Ibnu Majah no. 2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi)

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁷

Akad *qardh* dapat diterapkan untuk membantu umat dalam mengembangkan usahanya, sehingga dapat terbentuk sebuah semangat wirausaha dalam sektor industri mikro, yang pada akhirnya akan memacu percepatan ekonomi kerakyatan.

²⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, *loc.cit*, hlm. 133.

3. Aplikasi Pembiayaan *Qardh al-Hasan*

Dalam prakteknya *Al Qardh* dapat diterapkan oleh BMT dalam beberapa kondisi:²⁸

a. *Sebagai Produk Pelengkap*

Yakni BMT membuka produk *al qard*, karena terbatasnya dana sosial yang tersedia, atau rendahnya plafond yang diprogramkan. Dalam keadaan ini, produk *al qard* diterapkan jika keadaan sangat mendesak.

b. *Sebagai Fasilitas Pembiayaan*

BMT dapat mengembangkan produk ini, mengingat nasabah atau anggota yang dilayani BMT tergolong sangat miskin, sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.

c. *Pengembangan Produk Baitul Maal*

Al qard dikembangkan oleh BMT seiring dengan upaya pengembangan Baitul Maal. Kondisi ini yang paling ideal. Hal ini sekaligus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial BMT (Tamwil dan Maal). Dalam keadaan ini, *al qard* dapat dikembangkan lagi menjadi *al qardhul hasan*, yakni pinjaman kebajikan yang sumber dananya semata-mata dana zakat, infaq, atau sedekah.²⁹

²⁸ Muhammad Ridwan, *op.cit*, hlm. 174.

²⁹ *Ibid*, hlm. 174.

4. Sumber Dana Pembiayaan *Qardh al-Hasan*

Karena sifatnya yang tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung, maka sumber pendanaannya biasanya berasal dari dana sosial, meskipun BMT dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk membiayai *al qard*. Sumber dana *al-qard* dapat dibedakan menjadi:

a. *Dana Komersial atau Modal*

Dana ini diperuntukkan guna membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek, sementara dana zakat tidak tersedia. BMT dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman *al qard*. BMT juga dapat menyisihkan dana produktifnya seperti tabungan atau deposito untuk membiayai *al qard*. Atas dasar akad ini, BMT tidak diperbolehkan menetapkan sejumlah imbalan dalam bentuk apapun. Namun peminjam sangat disarankan untuk memberikan imbalan tanpa perjanjian dan BMT dapat mengakuinya sebagai tambahan pendapatan.

b. *Dana Sosial*

Dana ini diperuntukkan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong *delapan asnaf*. Pengelolaannya harus dipola sedemikian rupa sehingga penerima tidak menjadi tergantung terus. Disinilah dituntut supaya manajemen *Baitul Mal* ditata secara

profesional. Dana ini dapat berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, serta pendapatan yang diragukan, misalnya bunga bank dll.

5. Manfaat Pembiayaan *Qardh al-Hasan*

Manfaat *al-qardh* banyak sekali, diantaranya:

- a. Memungkinkan nasabah atau anggota mendapatkan talangan dana jangka pendek.
- b. Memperjelas identitas BMT dengan LKM lain termasuk bank, karena memadukan antara misi sosial dan bisnis.
- c. Memberikan dampak sosial yang lebih luas di masyarakat.³⁰

6. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Qardh al-Hasan*

Rukun *qardh* terdiri dari:

- a. Pemberi pinjaman (*muqridh*)

Pemberi pinjaman ialah orang yang memberikan pinjaman. Mereka ini terdiri dari pada orang yang mempunyai harta dan mengeluarkan harta miliknya itu untuk dipinjamkan kepada orang lain yang memerlukannya.

- b. Peminjam (*muqtaridh*)

Peminjam ialah mereka yang meminjamkan uang atau barang dari pada seseorang atau yang memohon pinjaman dari pada seseorang atau yang memohon pinjaman dari pada seseorang yang

³⁰ *Ibid*, hlm. 175.

mempunyai harta. Peminjam atau yang memohon pinjaman mestilah mempunyai kriteria yang sempurna sebagai syarat penting untuk melayakkannya membuat pinjaman menurut syara'.³¹

c. Serah terima kontrak (*ijab qabul*)

Lafal '*Akad* ialah lafaz '*ijab*' diucapkan oleh orang yang memberi pinjaman kepada orang yang meminjam dengan perkataan *ijab* seperti katanya; "*aku pinjamkan kepada kamu uang ini*" atau "*aku permilikkan hartaku ini kepadamu dengan syarat kamu bayar semula gantinya*".³²

Syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- a. Dana yang digunakan ada manfaatnya
- b. Ada kesepakatan diantara kedua belah pihak³³

7. Aspek Teknis Pembiayaan *Qardh al-Hasan*

a. *Musyawarah dan kesepakatan*

Kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan memperlancar urusan. Dua belah pihak yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama menjaga amanah dana masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al Maidah ayat 1 :

³¹ *Ibid*, hlm. 84.

³² *Ibid*, hlm. 87.

³³ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *loc.cit*, hlm. 196.

b. *Dokumentasi*

Dokumentasi adalah syarat transaksi atau pengikatan yang harus dilakukan nasabah dengan bank yang dipergunakan sebagai data masuk dan bukti dari perjanjian. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 :

𐀀𐀁𐀂𐀃𐀄𐀅𐀆𐀇𐀈𐀉𐀊𐀋𐀌𐀍𐀎𐀏𐀐𐀑𐀒𐀓𐀔𐀕𐀖𐀗𐀘𐀙𐀚𐀛𐀜𐀝𐀞𐀟𐀠𐀡𐀢𐀣𐀤𐀥𐀦𐀧𐀨𐀩𐀪𐀫𐀬𐀭𐀮𐀯𐀰𐀱𐀲𐀳𐀴𐀵𐀶𐀷𐀸𐀹𐀺𐀻𐀼𐀽𐀾𐀿𐁀𐁁𐁂𐁃𐁄𐁅𐁆𐁇𐁈𐁉𐁊𐁋𐁌𐁍𐁎𐁏𐁐𐁑𐁒𐁓𐁔𐁕𐁖𐁗𐁘𐁙𐁚𐁛𐁜𐁝𐁞𐁟𐁠𐁡𐁢𐁣𐁤𐁥𐁦𐁧𐁨𐁩𐁪𐁫𐁬𐁭𐁮𐁯𐁰𐁱𐁲𐁳𐁴𐁵𐁶𐁷𐁸𐁹𐁺𐁻𐁼𐁽𐁾𐁿𐂀𐂁𐂂𐂃𐂄𐂅𐂆𐂇𐂈𐂉𐂊𐂋𐂌𐂍𐂎𐂏𐂐𐂑𐂒𐂓𐂔𐂕𐂖𐂗𐂘𐂙𐂚𐂛𐂜𐂝𐂞𐂟𐂠𐂡𐂢𐂣𐂤𐂥𐂦𐂧𐂨𐂩𐂪𐂫𐂬𐂭𐂮𐂯𐂰𐂱𐂲𐂳𐂴𐂵𐂶𐂷𐂸𐂹𐂺𐂻𐂼𐂽𐂾𐂿𐃀𐃁𐃂𐃃𐃄𐃅𐃆𐃇𐃈𐃉𐃊𐃋𐃌𐃍𐃎𐃏𐃐𐃑𐃒𐃓𐃔𐃕𐃖𐃗𐃘𐃙𐃚𐃛𐃜𐃝𐃞𐃟𐃠𐃡𐃢𐃣𐃤𐃥𐃦𐃧𐃨𐃩𐃪𐃫𐃬𐃭𐃮𐃯𐃰𐃱𐃲𐃳𐃴𐃵𐃶𐃷𐃸𐃹𐃺𐃻𐃼𐃽𐃾𐃿𐄀𐄁𐄂𐄃𐄄𐄅𐄆𐄇𐄈𐄉𐄊𐄋𐄌𐄍𐄎𐄏𐄐𐄑𐄒𐄓𐄔𐄕𐄖𐄗𐄘𐄙𐄚𐄛𐄜𐄝𐄞𐄟𐄠𐄡𐄢𐄣𐄤𐄥𐄦𐄧𐄨𐄩𐄪𐄫𐄬𐄭𐄮𐄯𐄰𐄱𐄲𐄳𐄴𐄵𐄶𐄷𐄸𐄹𐄺𐄻𐄼𐄽𐄾𐄿𐅀𐅁𐅂𐅃𐅄𐅅𐅆𐅇𐅈𐅉𐅊𐅋𐅌𐅍𐅎𐅏𐅐𐅑𐅒𐅓𐅔𐅕𐅖𐅗𐅘𐅙𐅚𐅛𐅜𐅝𐅞𐅟𐅠𐅡𐅢𐅣𐅤𐅥𐅦𐅧𐅨𐅩𐅪𐅫𐅬𐅭𐅮𐅯𐅰𐅱𐅲𐅳𐅴𐅵𐅶𐅷𐅸𐅹𐅺𐅻𐅼𐅽𐅾𐅿𐆀𐆁𐆂𐆃𐆄𐆅𐆆𐆇𐆈𐆉𐆊𐆋𐆌𐆍𐆎𐆏𐆐𐆑𐆒𐆓𐆔𐆕𐆖𐆗𐆘𐆙𐆚𐆛𐆜𐆝𐆞𐆟𐆠𐆡𐆢𐆣𐆤𐆥𐆦𐆧𐆨𐆩𐆪𐆫𐆬𐆭𐆮𐆯𐆰𐆱𐆲𐆳𐆴𐆵𐆶𐆷𐆸𐆹𐆺𐆻𐆼𐆽𐆾𐆿𐇀𐇁𐇂𐇃𐇄𐇅𐇆𐇇𐇈𐇉𐇊𐇋𐇌𐇍𐇎𐇏𐇐𐇑𐇒𐇓𐇔𐇕𐇖𐇗𐇘𐇙𐇚𐇛𐇜𐇝𐇞𐇟𐇠𐇡𐇢𐇣𐇤𐇥𐇦𐇧𐇨𐇩𐇪𐇫𐇬𐇭𐇮𐇯𐇰𐇱𐇲𐇳𐇴𐇵𐇶𐇷𐇸𐇹𐇺𐇻𐇼𐇽𐇾𐇿𐈀𐈁𐈂𐈃𐈄𐈅𐈆𐈇𐈈𐈉𐈊𐈋𐈌𐈍𐈎𐈏𐈐𐈑𐈒𐈓𐈔𐈕𐈖𐈗𐈘𐈙𐈚𐈛𐈜𐈝𐈞𐈟𐈠𐈡𐈢𐈣𐈤𐈥𐈦𐈧𐈨𐈩𐈪𐈫𐈬𐈭𐈮𐈯𐈰𐈱𐈲𐈳𐈴𐈵𐈶𐈷𐈸𐈹𐈺𐈻𐈼𐈽𐈾𐈿𐉀𐉁𐉂𐉃𐉄𐉅𐉆𐉇𐉈𐉉𐉊𐉋𐉌𐉍𐉎𐉏𐉐𐉑𐉒𐉓𐉔𐉕𐉖𐉗𐉘𐉙𐉚𐉛𐉜𐉝𐉞𐉟𐉠𐉡𐉢𐉣𐉤𐉥𐉦𐉧𐉨𐉩𐉪𐉫𐉬𐉭𐉮𐉯𐉰𐉱𐉲𐉳𐉴𐉵𐉶𐉷𐉸𐉹𐉺𐉻𐉼𐉽𐉾𐉿𐊀𐊁𐊂𐊃𐊄𐊅𐊆𐊇𐊈𐊉𐊊𐊋𐊌𐊍𐊎𐊏𐊐𐊑𐊒𐊓𐊔𐊕𐊖𐊗𐊘𐊙𐊚𐊛𐊜𐊝𐊞𐊟𐊠𐊡𐊢𐊣𐊤𐊥𐊦𐊧𐊨𐊩𐊪𐊫𐊬𐊭𐊮𐊯𐊰𐊱𐊲𐊳𐊴𐊵𐊶𐊷𐊸𐊹𐊺𐊻𐊼𐊽𐊾𐊿𐋀𐋁𐋂𐋃𐋄𐋅𐋆𐋇𐋈𐋉𐋊𐋋𐋌𐋍𐋎𐋏𐋐𐋑𐋒𐋓𐋔𐋕𐋖𐋗𐋘𐋙𐋚𐋛𐋜𐋝𐋞𐋟𐋠𐋡𐋢𐋣𐋤𐋥𐋦𐋧𐋨𐋩𐋪𐋫𐋬𐋭𐋮𐋯𐋰𐋱𐋲𐋳𐋴𐋵𐋶𐋷𐋸𐋹𐋺𐋻𐋼𐋽𐋾𐋿𐌀𐌁𐌂𐌃𐌄𐌅𐌆𐌇𐌈𐌉𐌊𐌋𐌌𐌍𐌎𐌏𐌐𐌑𐌒𐌓𐌔𐌕𐌖𐌗𐌘𐌙𐌚𐌛𐌜𐌝𐌞𐌟𐌠𐌡𐌢𐌣𐌤𐌥𐌦𐌧𐌨𐌩𐌪𐌫𐌬𐌭𐌮𐌯𐌰𐌱𐌲𐌳𐌴𐌵𐌶𐌷𐌸𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽𐌾𐌿𐍀𐍁𐍂𐍃𐍄𐍅𐍆𐍇𐍈𐍉𐍊𐍋𐍌𐍍𐍎𐍏𐍐𐍑𐍒𐍓𐍔𐍕𐍖𐍗𐍘𐍙𐍚𐍛𐍜𐍝𐍞𐍟𐍠𐍡𐍢𐍣𐍤𐍥𐍦𐍧𐍨𐍩𐍪𐍫𐍬𐍭𐍮𐍯𐍰𐍱𐍲𐍳𐍴𐍵𐍶𐍷𐍸𐍹𐍺𐍻𐍼𐍽𐍾𐍿𐎀𐎁𐎂𐎃𐎄𐎅𐎆𐎇𐎈𐎉𐎊𐎋𐎌𐎍𐎎𐎏𐎐𐎑𐎒𐎓𐎔𐎕𐎖𐎗𐎘𐎙𐎚𐎛𐎜𐎝𐎞𐎟𐎠𐎡𐎢𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏄𐏅𐏆𐏇𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐏖𐏗𐏘𐏙𐏚𐏛𐏜𐏝𐏞𐏟𐏠𐏡𐏢𐏣𐏤𐏥𐏦𐏧𐏨𐏩𐏪𐏫𐏬𐏭𐏮𐏯𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻𐏼𐏽

³⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 156.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalny atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang

lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”³⁵

c. *Saksi*

Persaksian merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. Saksi harus orang adil bijaksana, tidak cacat mata, bisa bicara (bukan bisu), dan juga tidak cacat hukum.

d. *Wanprestasi*

Wanprestasi diberlakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu

³⁵ *Ibid*, hlm. 70.

perjanjian. Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.³⁶

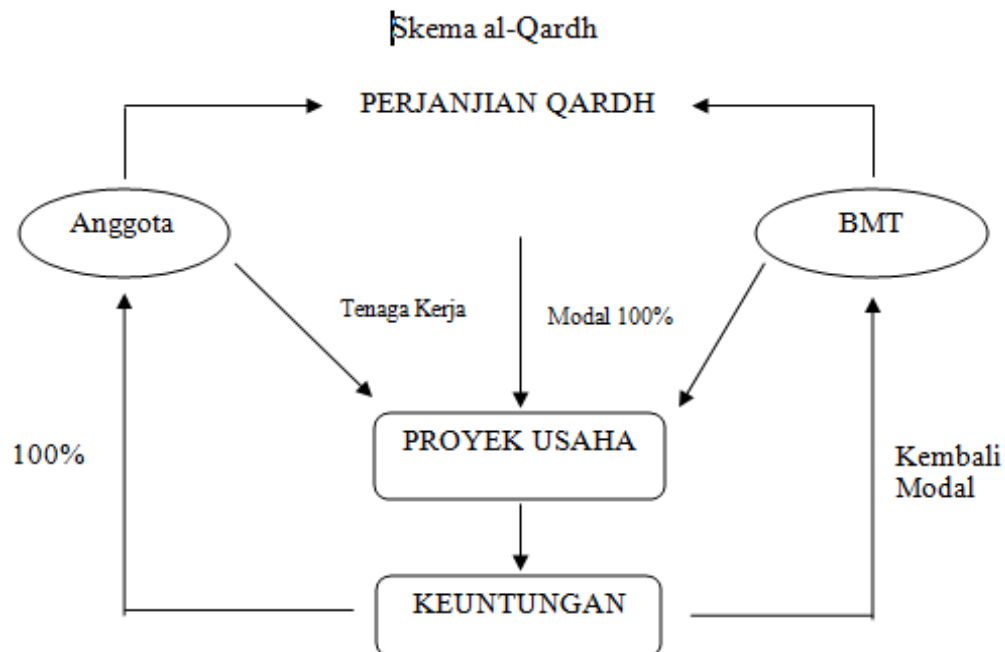
8. Ketentuan *al-Qardh* (Ref Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001)

a. Ketentuan umum *al-Qardh*

- 1) *al Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *al Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) senang sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya LKS dapat :
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.³⁷

³⁶ Muhammasd, *op cit*, hlm. 139.

Dalam kaitannya dengan syarat *al-qardh* sebagaimana tercantum bahwa dalam *qardh* dana yang digunakan haruslah bermanfaat dan juga harus ada kesepakatan diantara kedua belah pihak, yakni antara *muqtaridh* dan *muqridh* selain tentunya juga harus ada *qardh* dan *sighat* yang mana semuanya adalah rukun dari *qardh* itu sendiri.



Keterangan:

Dari skema pembiayaan *Qardh al-Hasan* diatas adalah antara BMT dan anggota melakukan kesepakatan atau perjanjian *Qardh al-Hasan* untuk menentukan proyek usaha yang bersifat modal kerja.

³⁷ *Ibid*, hlm. 140.

Dimana BMT menyediakan modal 100%, sedangkan tenaga kerja untuk pengembangan usaha disediakan oleh anggota, dan apabila dari usaha anggota memperoleh keuntungan, anggota berkewajiban mengembalikan dana yang dipinjam sesuai jangka waktu dan kesepakatan antara BMT. Apabila anggota dalam pengembalian dana memberi fee kepada BMT, maka fee tersebut dimasukkan kedalam dana untuk pembiayaan *qardh al-hasan* berikutnya.

C. Pengertian *Dlu'afa'*

Ada beberapa ayat Al Qur'an yang menjelaskan arti kata *dhuafa* yang berasal kata *dh'afan* atau *dhi'afan*. Salah satu firman Allah menyebutkan:³⁸

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَمَا كَانُوا عَالَمِينَ ۚ لَبِئْسَ مَا تَحْكُمُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَمَا كَانُوا عَالَمِينَ ۚ لَبِئْسَ مَا تَحْكُمُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَمَا كَانُوا عَالَمِينَ ۚ لَبِئْسَ مَا تَحْكُمُونَ ۚ

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah (*dhi'afan*), yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang baik.” (an Nisaa’: 9)³⁹

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَمَا كَانُوا عَالَمِينَ ۚ لَبِئْسَ مَا تَحْكُمُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَمَا كَانُوا عَالَمِينَ ۚ لَبِئْسَ مَا تَحْكُمُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَمَا كَانُوا عَالَمِينَ ۚ لَبِئْسَ مَا تَحْكُمُونَ ۚ

³⁸ Muhsin, *Menyayangi Dhuafa*, Jakarta : Gema Insani, 2004, hlm. 11.

³⁹ Departemen Agama RI, *Loc. Cit*, hlm. 116.

Berdasarkan beberapa ayat di atas, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa yang dimaksud kaum *dhuafa* adalah orang-orang lemah atau tertindas.⁴¹

Allah SWT dalam Al Qur'an telah memerintahkan kepada umatNya agar berbuat baik kepada kaum dhu'afa. Salah satu ayatnya menyatakan,

[illegible]

⁴¹ Muhsin, *Op. Cit*, hlm. 12.

*“Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil dari padakamu, dan kamu selalu berpaling.”(Al Baqarah:83)*⁴²

Perintah berbuat baik kepada mereka ini, antara lain, mengucapkan perkataan yang baik kepada mereka, memuliakan mereka, memelihara, mengasuh, dan mengurus mereka secara patut, menggauli mereka sebagai saudara, memberikan mereka nafkah, memberikan mereka harta, memberikan mereka makan, memberi mereka sedekah, memperbaiki tempat tinggal mereka dan melindungi harta mereka, membela, melindungi mereka dari kezaliman, mengobati mereka yang sakit, mengajak mereka makan bersama, memberikan mereka pendidikan dan pengajaran yang baik, memelihara mereka dengan penuh kasih sayang dan sopan santun, memaafkan dan berlapang dada pada mereka, mengucapkan perkataan yang sopan, serta memberi nasihat dan mendakwahkan mereka.⁴³

D. Pengembangan Teologi Pemberdayaan

Teologi pemberdayaan tradisional ditandai oleh manajemen pemberdayaan yang *ad hoc* (sementara) *accidental*, tidak konsepsional, tidak

⁴² Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 23.

⁴³ Muhsin, *Op. Cit*, hlm. 13.

sistematis dan tidak strategis. Manajemen pemberdayaan demikian cenderung semrawut, tidak efektif dan tidak efisien. Hal ini disebabkan ketiadaan sistem teologi manajemen pemberdayaan yang dinamis dan modern.⁴⁴

Secara konseptual pengelolaan pemberdayaan ekonomi dapat dipilah menjadi tiga ranah yakni:

1. Pemberdayaan secara institusional

Pemberdayaan yang bergerak dalam Badan Usaha, lembaga ini dapat bergerak pada berbagai sektor dan sesuai dengan peluang, kemampuan dan kemauannya. Misalnya: industri, pertanian, perdagangan, pemasaran, dan jasa.

Lembaga Penelitian, lembaga ini berfungsi sebagai pelaksana teknis bidang pengembangan dan pelatihan ekonomi. Adapun pengembangan ekonomi merupakan kerja lapangan melalui program penyuluhan, pendampingan, pengembangan ekonomi.

2. Pemberdayaan secara sosial

Perencanaan sosial yang baik harus memenuhi komponen-komponen dasarnya yakni terdapat vasilitator, motivator, dan pelaku. Vasilitator berfungsi sebagai pihak penyanggah ide sekaligus penyanggah dana sarana dan prasarana. Vasilitator berfungsi sebagai penyuluh dan pendamping kegiatan pemberdayaan. Pelaku

⁴⁴ Mujiyono Abdillah, *makalah Pemberdayaan Ekonomi Umat Muhammadiyah*, Semarang, 1999, hlm. 7.

pemberdayaan berfungsi sebagai obyek sekaligus sebagai subyek pemberdayaan.

3. Pemberdayaan secara struktural

Upaya pemberdayaan secara struktural dilakukan berdasarkan asumsi bahwa struktur ekonomi yang ada tidak kondusif bagi pemberdayaan ekonomi umat. Sebaliknya, tata struktural ekonomi yang ada justru kondusif bagi kelemahan ekonomi umat. Oleh karena itu, untuk memberdayakan ekonomi umat tata struktural ekonomi yang wajib dirombak dan digantikan dengan sistem struktur ekonomi baru.

E. Pemberdayaan *Dlu'afa*

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak. Sedangkan dari sisi sosial, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif. (BAB V, Pasal 16 UU No. 38 th 1999).⁴⁵

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahiq*

⁴⁵Muhammad Ridwan, *loc.cit*, hlm. 216.

sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan.⁴⁶

Amil dengan segala kesiapannya merupakan lembaga pemberdayaan dalam arti yang luas. Amil juga harus berperan sebagai agen perubahan dan pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan *mustahiq* sampai ada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedang program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini *mustahiq* tidak selamanya tergantung kepada amil.⁴⁷

Dalam hal zakat untuk usaha yang produktif, maka pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU No 38 tahun 1999, sebagai berikut.

1. *Melakukan studi kelayakan*

Yang dimaksud studi kelayakan yaitu upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat benar-benar dapat berkembang dan dapat mengembalikan pinjamannya.

2. *Menetapkan jenis usaha produktif*

Langkah ini sesungguhnya dapat berupa dua macam. Pertama, jika *mustahiq* belum memiliki usaha, maka tugas amil mendorong dan

⁴⁶*Ibid*, hlm 216.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 217.

mengarahkan sehingga *mustahiq* dapat membuka usaha yang layak. Sedapat mungkin dihindarkan kesan pemaksaan apalagi menggurui, karena akan berdampak kurang positif. Kedua, jika *mustahiq* telah memiliki usaha tetapi tidak berkembang, maka tugas amil, menganalisis usahanya.

3. *Melakukan bimbingan dan penyuluhan (pendampingan)*

Membimbing dan memberikan penyuluhan ini merupakan tugas untuk menjaga agar usahanya tetap berjalan dan berkembang serta mengamankan dana zakatnya. Tanpa fungsi ini, dikhawatirkan dana zakat akan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan usulannya. Fungsi ini selayaknya diperankan konsultan bagi perusahaan. Untuk mengefektifkan fungsi ini, *mustahiq* dapat dibuat kelompok, sehingga lebih mudah dalam pengarahan dan penyuluhan.

4. *Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan*

Tugas ini menjadi sulit dilakukan manakala *mustahiq*, belum menyadari pentingnya pengendalian. Meskipun amil bertanggung jawab atas pemantauan dan pengawasannya, namun yang terpenting sesungguhnya menciptakan kesadaran pengawasan oleh *mustahiq* sendiri. Artinya mendidik *mustahiq* untuk bertanggung jawab terhadap segala keputusan bisnis dan perilaku sosialnya.

5. *Mengadakan evaluasi*

Evaluasi dilakukan untuk mendapat data, bahwa usulan yang dijalankan dapat berkembang sesuai rencana, serta dana yang

disalurkan benar-benar tepat sasaran. Program ini dapat dilakukan bersama-sama dengan *mustahiq*. Diharapkan amil hanya akan memfasilitasi, sehingga *mustahiq* lah yang akan melakukan evaluasi sendiri.

6. *Membuat pelaporan*

Pelaporan merupakan wujud transparasi dan akuntabilitas lembaga amil zakat. Hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat termasuk pemerintah dan *muzakki* sendiri. Pelaporan dapat bersifat kuantitatif dan juga kualitatif.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 219.